

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari total penyebaran kuesioner sebanyak 113 kuesioner yang diterima kembali dimana sebanyak 29 kuesioner tidak dikembalikan, dengan demikian jumlah kuesioner yang dapat digunakan oleh peneliti sebanyak 84 kuesioner.

Tabel 5.1
Deskripsi Kuesioner

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Kuesioner yang didistribusikan	113 Responden	100%
Kuesioner yang tidak dikembalikan	29 Responden	25,64%
Kuesioner yang kembali	84 Responden	74,33%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan 84 kuesioner yang diolah, diperoleh informasi mengenai demografi responden sebagai acuan dalam melihat karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian. Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan dan lama bekerja. Adapun gambaran umum responden dapat dilihat pada tabel 5.2

Tabel 5.2
Karakteristik Responden

Kriteria		Frekuensi	Persentase (%)
		84	100%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	56	66,7%
	Perempuan	28	33,3%
Usia	<25 Tahun	31	36,9%
	26-30 Tahun	15	17,9%
	31-35 Tahun	11	13,1%
	36-45 Tahun	10	11,9%
	41-45 Tahun	6	7,1%
	55-60 Tahun	11	13,1%
Pendidikan	D3	38	45,2%
	S1	44	52,4%
	S2	2	2,4%
	S3	0	0%
Jabatan	Auditor Madya	10	11,9%
	Auditor Penyelia	5	6,0%
	Auditor Muda	19	22,6%
	Auditor Pertama	13	15,5%
	Auditor Terampil	37	44,0%
Lama Bekerja	<5 Tahun	59	70,2%
	6-10 Tahun	19	22,6%
	11-15 Tahun	4	4,8%
	>15 Tahun	2	2,4%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5.2 dilihat dari kriteria jenis kelamin, responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang dengan persentase 66,7% sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang dengan persentase sebesar 33,3%. Dilihat dari mayoritas responden berada di rentang umur <25 Tahun sebanyak 31 orang dengan persentase 36,9%.

Dari sisi pendidikan, terlihat bahwa lulusan D3 yaitu sebanyak 38 orang dengan persentase 45,2%, diikuti oleh lulusan S1 dan S2 dengan masing-masing sebanyak 44 orang dan 2 orang dengan persentase masing-masing adalah 52,4% dan 2,4%.

Dari sisi jabatan, didominasi auditor terampil sebanyak 37 dengan persentase 44,0%, auditor muda sebanyak 19 orang dengan persentase 22,6%, auditor pertama sebanyak 13 orang dengan persentase 15,5%, auditor madya sebanyak 10 orang dengan persentase 11,9% dan auditor penyelia sebanyak 5 orang dengan persentase 6,0%.

Sedangkan dari sisi lama bekerja, mayoritas responden adalah yang masa kerjanya 0-5 tahun yaitu sebanyak 59 orang dengan persentase 70,2%, diikuti oleh responden yang masa kerjanya 6-10 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 22,6%, responden dengan masa kerja 11-15 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 4,8% serta responden dengan masa kerjanya >15 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 2,4%.

5.1.2 Statistik Deskriptif

1. Deskripsi Variabel Akuntabilitas (X1)

Berdasarkan jawaban angket hasil penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, dapat diperoleh deskripsi mengenai tingkat capaian responden. Hasil analisa TCR untuk sub variabel pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas

Indikator	No Item	STS	TS	N	S	SS	Mean	TCR %	Kategori
Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.	1	3	0	15	51	15	3,89	77,9%	Baik
	2	0	6	27	35	16	3,73	74,5%	Baik
	3	0	9	15	52	8	3,70	74%	Baik
	Rata-Rata Skor Indikator							3,77	75,5%
Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan maupun kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.	4	0	4	32	36	12	3,67	73,3%	Baik
	5	0	7	26	39	12	3,67	73,3%	Baik
	6	1	4	27	44	8	3,64	72,9%	Baik
	Rata-Rata Skor Indikator							3,66	73,2%
Adanya output dan outcome yang terukur.	7	3	11	22	46	2	3,39	67,9%	Baik
	8	1	7	42	33	1	3,31	66,2%	Baik
	Rata-Rata Skor Indikator							3,35	67%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5.3, di peroleh rata-rata indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan adalah 3,77 dengan tingkat capaian 75,5% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kategori baik.

Rata-rata indikator adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan maupun kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan adalah 3,66 dengan tingkat capaian 73,2% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan maupun kelalaian dalam pelaksanaan

kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kategori baik.

Rata-rata indikator adanya output dan outcome yang terukur adalah 3,35 dengan tingkat capaian 67% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator adanya output dan outcome yang terukur pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kategori baik.

2. Deskripsi Variabel Transparansi (X2)

Berdasarkan jawaban angket hasil penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah, dapat diperoleh deskripsi mengenai tingkat capaian responden. Hasil analisa TCR untuk sub variabel pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4
Distribusi Variabel Transparansi

Indikator	No Item	STS	TS	N	S	SS	Mean	TCR %	Kategori
Informatif	1	0	14	38	25	7	3,30	66%	Baik
	2	0	16	35	21	12	3,35	66,9%	Baik
	3	0	13	43	23	5	3,24	64,8%	Cukup
	Rata-Rata Skor Indikator							3,29	66,9%
Keterbukaan	4	2	16	29	28	9	3,31	66,2%	Baik
	5	2	20	34	23	5	3,11	62,1%	Cukup
	6	3	20	38	21	2	2,99	59,8%	Cukup
	Rata-Rata Skor Indikator							3,13	62,7%
Pengungkapan	7	0	13	36	28	7	3,35	66,9%	Baik
	8	0	17	31	35	1	3,24	64,8%	Cukup
	9	0	15	25	28	12	3,35	66%	Baik
	Rata-Rata Skor Indikator							3,31	66,2%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5.4, di peroleh rata-rata indikator informatif adalah 3,29 dengan tingkat capaian 66,9% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator informatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kategori baik.

Rata-rata indikator keterbukaan adalah 3,13 dengan tingkat capaian 62,7% dengan kategori cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator keterbukaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kategori cukup.

Rata-rata indikator pengungkapan adalah 3,31 dengan tingkat capaian 66,2% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator keterbukaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kategori baik.

3. Deskripsi Variabel Pengawasan (X3)

Berdasarkan jawaban angket hasil penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah, dapat diperoleh deskripsi mengenai tingkat capaian responden. Hasil analisa TCR untuk sub variabel pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel 5.5 di bawah ini.

Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi Varibel Pengawasan

Indikator	No Item	STS	TS	N	S	SS	Mean	TCR %	Kategori
Menetapkan standar	1	0	11	14	45	14	3,74	74,8%	Baik
	2	0	7	16	48	13	3,80	76%	Baik
	Rata-Rata Skor Indikator						3,77	75,4%	Baik
Pengukuran	3	3	8	24	44	5	3,48	69,5%	Baik
	4	2	12	31	35	4	3,32	66,4%	Baik
	Rata-Rata Skor Indikator						3,40	68%	Baik
Membandingkan	5	0	10	16	54	4	3,62	72,4%	Baik
	6	0	7	23	48	6	3,63	72,6%	Baik
	Rata-Rata Skor Indikator						3,63	72,5%	Baik
Melakukan Tindakan	7	1	6	18	46	13	3,76	75,2%	Baik
	8	1	8	21	36	18	3,74	74,8%	Baik
	Rata-Rata Skor Indikator						3,75	75%	Baik

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5.5, di peroleh rata-rata indikator menetapkan standar adalah 3,77 dengan tingkat capaian 75,4% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator menetapkan standar pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kategori baik.

Rata-rata indikator pengukuran adalah 3,40 dengan tingkat capaian 68% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator pengukuran pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kategori baik.

Rata-rata indikator membandingkan adalah 3,63 dengan tingkat capaian 72,5% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator membandingkan pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kategori baik.

Rata-rata indikator melakukan tindakan adalah 3,75 dengan tingkat capaian 75% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator melakukan tindakan pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kategori baik.

5.1.3 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2018), kuesioner dikatakan valid apabila angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi korelasi skor dari setiap butir pernyataan terhadap total skornya untuk masing-masing. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid apabila nilai korelasi (r hitung) $>$ r tabel. Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak $(n) = 84$. Maka diketahui nilai r tabel adalah 0,212.

Tabel 5.6
Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,504	0,212	Valid
	X1.2	0,636	0,212	Valid
	X1.3	0,576	0,212	Valid
	X1.4	0,534	0,212	Valid
	X1.5	0,614	0,212	Valid
	X1.6	0,585	0,212	Valid
	X1.7	0,585	0,212	Valid
	X1.8	0,447	0,212	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0,708	0,212	Valid
	X2.2	0,807	0,212	Valid
	X2.3	0,695	0,212	Valid
	X2.4	0,789	0,212	Valid
	X2.5	0,778	0,212	Valid
	X2.6	0,728	0,212	Valid
	X2.7	0,803	0,212	Valid
	X2.8	0,688	0,212	Valid
	X2.9	0,796	0,212	Valid
Pengawasan (X3)	X3.1	0,649	0,212	Valid
	X3.2	0,531	0,212	Valid
	X3.3	0,645	0,212	Valid
	X3.4	0,748	0,212	Valid
	X3.5	0,586	0,212	Valid
	X3.6	0,615	0,212	Valid
	X3.7	0,638	0,212	Valid
	X3.8	0,585	0,212	Valid
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Y.1	0,490	0,212	Valid
	Y.2	0,515	0,212	Valid
	Y.3	0,546	0,212	Valid
	Y.4	0,574	0,212	Valid
	Y.5	0,620	0,212	Valid
	Y.6	0,619	0,212	Valid
	Y.7	0,622	0,212	Valid
	Y.8	0,430	0,212	Valid
	Y.9	0,593	0,212	Valid

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 5.6, menunjukkan bahwa suatu pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitung $> 0,212$ (r tabel). Diketahui seluruh nilai r hitung $> 0,212$ (r tabel). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan telah valid.

2. Uji Realibilitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu terkait pertanyaan yang diajukan. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien Cronbach Alpha (α) dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai Cronbach's Alpha diatas 0,6 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.7

Tabel 5.7
Uji Realibilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	.690	0,6	Reliabel
Transparansi (X2)	.905	0,6	Reliabel
Pengawasan (X3)	.776	0,6	Reliabel
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	.714	0,6	Reliabel

Sumber: Data Diolah,2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 5.7, menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas indikator dari variabel Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh Cronbach Alpha $> 0,6$ yang artinya semua indikator dinyatakan reliabel.

5.1.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini,

menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal.

Tabel 5.8
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		Unstandardized Residual	84
Normal Parameters ^a	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.50668699
Most Extreme Differences	Absolute		.083
	Positive		.083
	Negative		-.067
Kolmogorov-Smirnov Z			.765
Asymp. Sig. (2-tailed)			.603

a. Test distribution is Normal

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 25, 2023

Berdasarkan pada Tabel 5.8 pada uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov signifikan pada $0,603 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa metode regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi (Ghozali, 2011). penelitian ini menggunakan teknik Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance dengan ketentuan Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila $VIF \geq 10$ maka terdapat masalah multikolinearitas. Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 5.9
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	8.013	3.146				2.547
Akuntabilitas	.412	.087	.439	4.719	.000	.792	1.263
Transparansi	.186	.051	.335	3.603	.001	.795	1.257
Pengawasan	.149	.067	.186	2.232	.028	.992	1.008

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil tabel 5.9 diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai toleransi pada Akuntabilitas sebesar 0,792, Transparansi sebesar 0,795, dan Pengawasan sebesar 0,952. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen, sehingga dalam model regresi ini baik. Sedangkan nilai VIF Akuntabilitas sebesar 1,263, Transparansi sebesar 1,257, dan Pengawasan sebesar 1,008 menunjukkan dimana semua variabel independen memiliki nilai VIF <10 sehingga dalam model regresi ini baik dan tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Model regresi dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau $> 0,05$ dan sebaliknya.

Tabel 5.10
Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.905	2.688		1.081	.288
Akuntabilitas	-.082	.051	-.312	-1.603	.119
Transparansi	.031	.035	.164	.892	.379
Pengawasan	-.036	.060	-.110	-.601	.552

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 25, 2023

Berdasarkan data hasil uji glejser menunjukkan nilai signifikansi variabel Akuntabilitas sebesar 0,119, Transparansi sebesar 0,379, Pengawasan sebesar 0,552, hasil tersebut jelas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak terdapat gejala heterokedastisitas hal tersebut karena nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 5%.

5.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan pengujian analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh positif atau negatif. Jadi analisis regresi linear berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2018). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 5.11:

Tabel 5.11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.013	3.146		2.547	.013
	Akuntabilitas	.412	.087	.439	4.719	.000
	Transparansi	.186	.051	.335	3.603	.001
	Pengawasan	.149	.067	.186	2.232	.028

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber: Data primer diolah oleh SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 5.11, hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 25, maka diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 8.013 + 0,412 X_1 + 0,186 X_2 + 0,149 X_3 + e$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Nilai konstanta (α) = 8.013 menunjukkan nilai konstan dimana jika nilai variabel independen Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan dianggap konstan maka rata-rata Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 8.013.
2. Nilai koefisien regresi linear variabel Akuntabilitas sebesar 0,412. Hal ini menunjukkan apabila Akuntabilitas naik sebesar satu satuan dengan catatan variabel independen lain dianggap konstan maka akan menaikkan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,412.

3. Nilai koefisien regresi linear variabel Transparansi sebesar 0,186. Hal ini menunjukkan apabila Transparansi naik sebesar satu satuan dengan catatan variabel independen lain dianggap konstan maka akan menaikkan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,186.
4. Nilai koefisien regresi linear variabel Pengawasan sebesar 0,149. Hal ini menunjukkan apabila Pengawasan naik sebesar satu satuan dengan catatan variabel independen lain dianggap konstan maka akan menaikkan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,149.

5.1.6 Pengujian Hipotesis

1. Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jika diketahui nilai signifikan $< 0,05$, atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$, $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.12

Tabel 5.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.013	3.146		2.547	.013
	Akuntabilitas	.412	.087	.439	4.719	.000
	Transparansi	.186	.051	.335	3.603	.001
	Pengawasan	.149	.067	.186	2.232	.028

Sumber: Data primer diolah oleh SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.12, maka pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel Akuntabilitas (X1) bernilai 0,412. Sedangkan nilai signifikan untuk pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung dari Akuntabilitas (X1) $4,719 > t$ tabel 1,664, dimana 1,664 adalah t tabel dengan rumus $t \text{ tabel} = t(a/2 ; n-k-1)$ dimana nilai $a = 0,05 : 2 = 0,025$, $n = 84$, $k = 3-1$, jadi didapat t tabelnya 1,664. Hal ini berarti Akuntabilitas (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), dengan demikian hipotesis (H1) diterima.
2. Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel Transparansi (X2) bernilai 0,186. Sedangkan nilai signifikan untuk pengaruh Transparansi (X2) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y) adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung dari Transparansi (X2) $3,603 > t$ tabel 1,664. Hal ini berarti Transparansi (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), dengan demikian hipotesis (H2) diterima.
3. Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel Pengawasan (X3) bernilai 0,149. Sedangkan nilai signifikan untuk pengaruh Pengawasan (X3) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar $0,028 < 0,05$ dan nilai t hitung dari Pengawasan (X3) $2,232 > t$ tabel 1,664. Hal ini berarti Pengawasan (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y), dengan demikian hipotesis (H3) diterima.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 5.13
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	428.031	3	142.677	21.886	.000 ^a
	Residual	521.529	80	6.519		
	Total	949.560	83			
a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas						
b. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah						

Sumber: Data primer diolah oleh SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 5.13 diketahui nilai F hitung $21.886 > F$ tabel $2,71$ dan nilai Signifikan adalah $0,000 < 0.05$. Hal ini berarti Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan Pengawasan (X3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Dengan demikian hipotesis H4 diterima.

3. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinan bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 5.14 menunjukkan koefisien determinan:

Tabel 5.14
Hasil Koefisien Determinan (Adjusted R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.451	.430	2.553

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Data primer diolah oleh SPSS 25, 2023

Berdasarkan Tabel 5.14, hasil perhitungan koefisien regresi dalam penelitian ini diperoleh nilai *Adjusted R Square* adalah 0,430 atau 43%. Hal ini berarti variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 43% sedangkan sisanya sebesar 57% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

5.2.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil analisis deskriptif menemukan rata-rata tingkat capaian responden (TCR) untuk variabel akuntabilitas dengan pencapaian tertinggi pada indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan sebesar 75,5% yang masuk dalam kategori baik. Hal ini berarti akuntabilitas yaitu pelaksanaan kinerja instansi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan.

Dari hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dengan nilai t hitung $4,719 > t$ tabel $1,664$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan salah satu

bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah untuk melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Ini mencakup segala aspek operasional, kebijakan, dan program yang dilaksanakan oleh instansi tersebut. Kinerja pemerintah dikatakan baik karena bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan sumber daya termasuk pengelolaan keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan dan kepentingan publik.

Teori *Stewardship* menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Hal tersebut menggambarkan hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya melalui keterkaitan antara akuntabilitas dan teori stewardship, pemerintah dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, memastikan kebijakan dan tindakan mereka sesuai dengan kepentingan publik, dan mengelola sumber daya secara optimal sebagai bentuk pelayanan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Damayanti (2018) menunjukkan akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap kinerja pemerintah.

Semakin baik bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, maka semakin baik pula kinerjanya. Berbeda dengan yang dilakukan penelitian oleh Ambarwati (2021) menunjukkan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

5.2.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil analisis deskriptif menemukan rata-rata tingkat capaian responden (TCR) untuk variabel transparansi dengan pencapaian tertinggi pada indikator informatif dan keterbukaan sebesar 66,9% yang masuk dalam kategori baik. Hal ini diartikan pelaporan kinerja instansi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah baik dan transparansi dalam memberikan informasi kepada publik.

Dari hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dengan nilai t hitung $3,603 > t$ tabel $1,664$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$ menunjukkan hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti transparansi sangat dibutuhkan dalam kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu adanya keterbukaan dalam melaporkan hasil kinerja yang telah dilakukan guna mengungkapkan informasi keuangan maupun non keuangan secara jelas, akurat dan tepat waktu sesuai dengan prinsip transparansi. Dengan memberikan informasi yang transparan, para pemangku kepentingan dapat melihat dan memahami bagaimana pemerintah menjalankan perannya sebagai pengawas kepentingan masyarakat.

Teori *stewardship* menekankan perlunya membangun dan memelihara kepercayaan publik, dan transparansi adalah cara efektif untuk mencapai hal ini. Ketika masyarakat melihat pemerintah bertindak transparan, kepercayaan mereka terhadap kejujuran bahwa pemerintah bertindak untuk kepentingan publik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Damayanti (2018) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif terhadap

kinerja pemerintah. Transparansi kinerja pemerintah menjadi penting karena melibatkan hak publik untuk mengetahui bagaimana sumber daya publik dikelola dan bagaimana kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan penelitian oleh Syahdika (2021) menunjukkan transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

5.2.3 Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil analisis deskriptif menemukan rata-rata tingkat capaian responden (TCR) untuk variabel pengawasan dengan pencapaian tertinggi pada indikator menetapkan standar dan melakukan tindakan sebesar 75,4% yang masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan kinerja instansi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah melaksanakan pengawasan sesuai dengan standar dan melakukan pemeriksaan pada setiap pelaksanaan kegiatan.

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dengan nilai t hitung $2,232 > t$ tabel $1,664$ dengan signifikansi $0,028 < 0,05$ menunjukkan hipotesis ketiga diterima. Hal ini berarti pengawasan memiliki peran penting terkait dengan kinerja instansi pemerintah karena berperan dalam menjaga integritas dan etika tindakan pemerintah. Pengawasan yang baik dilakukan secara internal dan eksternal sehingga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah. Melalui proses pengawasan dan evaluasi kinerja, pemantauan memungkinkan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan atau perubahan strategis. Pengawasan melibatkan evaluasi kinerja program dan proyek pemerintah untuk memastikan

bahwa alokasi dana dan sumber daya yang signifikan memberikan hasil yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan kebijakan publik.

Teori *stewardship* menekankan tanggung jawab para pejabat pemerintah untuk mengelola dengan baik sumber daya publik, sementara pengawasan merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa tanggung jawab ini dijalankan dengan benar dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Teori *stewardship* menekankan kejelasan tujuan dan kebijakan sebagai elemen utama dalam tindakan pemerintah. Pengawasan membantu memastikan bahwa tujuan dan kebijakan tersebut dijalankan sesuai dan untuk kepentingan publik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Ambarwati (2021) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Pengawasan membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Dengan menemukan masalah ini secara dini, instansi dapat mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan instansi. Berbeda dengan penelitian oleh Putra dan Indraswarawati (2021) menunjukkan pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

5.2.4 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil, bahwa Akuntabilitas, Tranparansi dan pengawasan berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dengan kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil uji T menunjukkan pengaruh yang sangat besar dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen. Dari ketiga variabel tersebut meliputi Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat dan jika ketiga variabel tersebut mengalami kenaikan yang signifikan maka kinerja instansi pemerintah akan mengalami kenaikan yg signifikan pula.

Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa agar kinerja instansi mengalami peningkatan maka perlu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah agar sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Maka peran pengawasan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan guna mengontrol dan memantau setiap kegiatan agar berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Novatianti (2019) menunjukkan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Valerianus (2021) menunjukkan akutabilitas, transparansi, dan pengawasan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah.